



Konflik Internal Umat Islam Dan Peran Aswaja Dalam Membangun Rekonsiliasi Sosial

Internal Conflicts Among Muslims and the Role of Aswaja in Building Social Reconciliation

Akmir¹, Akbar², Ahmad Irfan Rivaldi³, Mar'iyah Qibthiyah⁴, Fatmawati⁵

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah

Email: akmirakmir@gmail.com¹, akbaralumni098@gmail.com², fandiirfan015@gmail.com³,
mariyahqibthiyahh@gmail.com⁴, fatmawatiw673@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 24-12-2025

Revised : 26-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Published : 30-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the factors causing internal conflict among Muslims in Indonesia, its impact on socio-religious life, and examine the role of the Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) methodology as a moderation paradigm in building social reconciliation. This study employed a literature review method, reviewing various scholarly sources such as books, journal articles, Islamic organizational documents, and other relevant academic publications. Data were analyzed descriptively and qualitatively through a process of identifying, sorting, and synthesizing concepts related to internal conflict and the Aswaja principles. The results show that internal conflict not only triggers theological polarization but also weakens the socio-political position of the Muslim community, hinders community development, and diminishes Islam's image as a religion of peace. Meanwhile, the Aswaja methodology, with its principles of tawassuth (compassion), tawazun (balance), tasamuh (tolerance), and amar ma'ruf (enjoining good and forbidding evil), has proven to be a moderating framework capable of fostering dialogue, tolerance, and social reconciliation. This study emphasizes the importance of revitalizing Aswaja values in maintaining internal Islamic diversity and strengthening social harmony in Indonesia.

Keywords: *Internal conflict, Muslims, Aswaja*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik internal umat Islam di Indonesia, dampaknya terhadap kehidupan sosial-keagamaan, serta menelaah peran manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai paradigma moderasi dalam membangun rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dokumen organisasi Islam, serta publikasi akademik lainnya yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, pemilahan, dan sintesis konsep-konsep terkait konflik internal dan prinsip Aswaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal tidak hanya memicu polarisasi teologis, tetapi juga melemahkan posisi sosial-politik umat, menghambat pembangunan umat, serta menurunkan citra Islam sebagai agama kedamaian. Sementara itu, manhaj Aswaja dengan prinsip tawassuth, tawazun, tasamuh, dan amar ma'ruf nahi munkar terbukti menjadi kerangka moderatif yang mampu mendorong dialog, toleransi, serta rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Aswaja dalam merawat keberagaman internal Islam dan memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

Kata kunci: *Konflik internal, umat Islam, Aswaja*



PENDAHULUAN

Umat Islam merupakan salah satu komunitas keagamaan terbesar dan paling beragam di dunia. Keragaman ini tampak tidak hanya pada perbedaan mazhab dan madzhab fikih, namun juga pada variasi praktik keagamaan, tradisi kultural, orientasi intelektual, serta struktur kelembagaan mulai dari pesantren tradisional, ormas keagamaan, sarjana-modernis, hingga kelompok-kelompok keagamaan kontemporer yang tumbuh di ruang digital. Heterogenitas tersebut menjadi salah satu kekayaan intelektual yang memperkaya peradaban Islam, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya gesekan dan konflik internal apabila perbedaan dipahami dan dikelola secara tidak arif. (Mahfudotullah, Yeby Ma'asan Mayrudin. (2024). Vol 24, No 2)

Konflik bagian dari *min lawazim al-hayah* atau kelaziman hidup. Pada perjalanan sejarah kehidupan manusia yang lebih kompleks, konflik pun banyak dibahas baik itu dalam kisah-kisah mitologi maupun dalam kitab-kitab suci. Tentu dengan berbagai bentuk dan kompleksitas yang berbeda-beda. Memasuki periode sebelum masehi pun konflik tercatat dalam sejarah, baik itu peperangan antar suku, kelompok, kerajaan bahkan agama telah banyak terjadi. Begitu juga ketika sudah memasuki abad-abad berikutnya sesudah masehi. Ada banyak konflik-konflik besar yang pernah terjadi dan tercatat sejarah, namun lebih banyak konflik-konflik lainnya yang tidak tercatat dan tidak terhitung pula jumlahnya. Hal ini karena konflik yang terdokumentasi hanya konflik yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan.

Konflik bernuansa agama yang tak terlupakan dalam sejarah adalah perang salib. Konflik ini pun dampaknya sangat terasa hingga kini dan menjadi horror stories bagi hubungan antar pemeluk agama, khususnya Islam dan Kristen. Perang Agama di Eropa juga berlangsung lama. Konflik internal dalam beberapa agama juga banyak terjadi. Dalam Islam misalnya tercatat, ada khawarij, ada Sunni dan ada Syiah yang dulu terpecah karena persoalan politik dan berlanjut pada konflik teologi hingga saat ini. Begitu juga aliran-aliran kecil dalam Kristen, dalam Hindu, dan dalam agama-agama besar di dunia. Memasuki zaman modern, terjadi bermacam-macam konflik termasuk konflik politik, sosial hingga yang bernuansa agama. (Abd. Aziz Faiz, 2020, hal 180-181)

Data laporan tahunan Wahid Foundation tahun 2018, masih menunjukkan tingginya konflik bernuansa agama. Kasus tertinggi masih terjadi di DKI Jakarta dengan 32 Kasus, disusul Jawa Barat 26, Jawa Timur 17, Banten 16, Aceh 14, Jawa Tengah 13, Sumatera Utara 12, Sumatera Selatan 11, Jambi 8, dan Riau 7 kasus. Angka-angka ini menunjukkan masih relatif tingginya konflik bernuansa agama dengan berbagai aktor, baik aktor yang datang dari ormas, perorangan, hingga negara. (Wahid Foundation, 2018)

Dalam menghadapi kompleksitas ini, manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) muncul sebagai rujukan penting di Indonesia. Aswaja, dengan tradisi intelektualnya yang menekankan prinsip moderasi (*tawassuth*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan sikap adil (*i'tidal*), menawarkan kerangka normatif dan praktis untuk mengelola perbedaan. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teoretis, namun juga tercermin dalam praktik keagamaan dan pendidikan di banyak pesantren serta kegiatan dialog keagamaan yang dijalankan oleh jaringan ulama dan ormas tradisional seperti Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Aswaja berpotensi menjadi basis rekonsiliasi sosial yang mampu menjembatani jurang perbedaan.



Penelitian ini hadir dalam kerangka upaya memahami dinamika konflik internal umat Islam di Indonesia sekaligus mengeksplorasi kontribusi Aswaja dalam proses rekonsiliasi. Kajian diarahkan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik, pola perebutan legitimasi keagamaan dan politik yang memicu polarisasi, serta strategi-strategi rekonsiliasi yang relevan. Selain itu, studi ini meninjau peran lembaga pendidikan keagamaan, jaringan ulama, dan praktik komunikasi keagamaan baik tradisional maupun digital dalam menyuburkan atau meredam konflik.

Rumusan masalah yang menjadi panduan kajian antara lain: (1) apa saja faktor utama yang memicu konflik internal umat Islam di Indonesia saat ini; (2) bagaimana dampak konflik internal terhadap umat Islam; dan (3) sejauh mana prinsip-prinsip Aswaja diterapkan dalam praktik rekonsiliasi sosial serta apa kendala dan peluang implementasinya. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis kualitatif terhadap sumber primer dan sekunder, artikel ini diharapkan memberikan sintesis teoritis sekaligus rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan termasuk ulama, pemimpin ormas, pendidik, dan pembuat kebijakan — dalam upaya memperkuat kohesi sosial berbasis nilai-nilai moderat.

Akhirnya, kajian ini juga menempatkan perhatian pada era digital sebagai medan baru interaksi sosial-keagamaan: sementara teknologi informasi membuka ruang bagi dialog lintas kelompok, ia juga mempercepat penyebaran wacana yang memecah belah. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara-cara Aswaja beradaptasi dan berintervensi pada ranah digital menjadi bagian penting dari upaya rekonsiliasi yang relevan dengan tantangan kekinian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen organisasi Islam, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema konflik internal umat Islam dan peran Aswaja dalam rekonsiliasi sosial. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian direduksi, dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan disintesis untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan tematik antara dinamika konflik dan prinsip-prinsip Aswaja. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk mendukung kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Faktor yang Memicu Konflik Internal Umat Islam di Indonesia

Hendropuspito dalam Kamal (2021) menyebutkan bahwa keterlibatan agama dalam konflik setidaknya terjadi karena 4 faktor seperti berikut (Kamal, A., 2021):

1. Perbedaan doktrin dan sikap mental

Perbedaan doktrin menjadi salah satu faktor karena kepercayaan yang berbeda tidak dapat dinegosiasikan. Ada orang yang membandingkan agama mereka dengan agama orang lain, menilai agama lain sesuai dengan standar agama mereka, dan membela agama mereka sendiri.



2. Perbedaan suku dan ras penganut agama

Agama-agama menghubungkan banyak suku dan negara dengan memberikan identitas baru, tetapi dalam keadaan tertentu, identitas agama ini justru melekat di beberapa kelompok etnis tertentu dan menjadi mayoritas disana. Contohnya seperti Islam di Timur Tengah, Hindu di India, dan Kristen di Eropa.

3. Perbedaan tingkat kebudayaan

Agama berperan penting bagi kelompok sosial dalam menciptakan tingkat kemajuan budaya. Contohnya dalam kolonialisme, Kristen Eropa merasa memiliki kebudayaan dan agama yang lebih baik daripada pribumi, sehingga mereka melakukan tindakan diskriminatif terhadap pribumi dengan agama yang berbeda dari mereka.

4. Isu mayoritas dan minoritas

Dalam masyarakat multikultural, ada beberapa hal yang muncul dalam konflik mayoritas dan minoritas seperti:

- a. Agama berubah menjadi ideologi: Agama mayoritas memunculkan hegemoni yang luas dan menyeluruh dalam kehidupan, sehingga mempengaruhi semua dimensi baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hingga kedudukan agama berubah menjadi ideologi utama yang sangat politis.
- b. Mitos dari mayoritas bahwa agama dan politik tidak perlu dibedakan: Mitos mengatakan bahwa wajar jika kekuasaan dimiliki mayoritas karena minoritas tidak memiliki kekuasaan.
- c. Prasangka antara mayoritas dan minoritas Prasangka muncul dari pihak mayoritas karena mereka merasa takut jika suatu saat pihak minoritas merebut posisi mereka. Sehingga pihak mayoritas tidak memberikan ruang pada pihak minoritas. Sedangkan pihak minoritas memiliki prasangka dengan hak dan keberadaan mereka. Mereka merasa posisi mereka terancam, akan didiskriminasi, dan tidak berkembang dengan baik. (Ratna Dwi Anjani, Aceng Kosasih, 2024, No 1:16-29)

Dampak Konflik Internal terhadap Umat Islam

Konflik internal di kalangan umat Islam memberikan dampak yang luas, tidak hanya terhadap relasi antarindividu dan kelompok, tetapi juga terhadap perkembangan sosial, politik, dan kultural umat secara keseluruhan. Konflik ini sering kali memicu dinamika destruktif yang berpengaruh pada kehidupan keagamaan, integrasi sosial, bahkan posisi umat Islam dalam pembangunan bangsa. Adapun dampak-dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terjadinya Polarisasi dan Perpecahan Umat

Konflik internal membuat umat Islam terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga dan sulit membangun dialog. Perbedaan teologis atau praktik ibadah yang seharusnya dikelola secara ilmiah justru diperuncing menjadi perdebatan emosional. Polarisasi semakin tajam ketika diperkuat oleh media sosial, di mana narasi saling menyalahkan, stigmatisasi kelompok lain, serta ujaran kebencian tersebar tanpa kendali. Akibatnya, solidaritas dan ukhuwah Islamiyah melemah, dan kohesi sosial antar kelompok umat Islam menjadi rentan.



2. Melemahnya Posisi Umat Islam dalam Konteks Sosial-Politik Nasional

Ketika umat Islam sibuk bertikai dalam isu-isu internal, energi kolektif yang seharusnya digunakan untuk membangun kekuatan politik yang konstruktif justru terpecah. Konflik antarormas, antarulama, atau antarmahaj mengurangi kapasitas umat untuk bersuara secara kompak dalam isu-isu strategis nasional. Fragmentasi ini berdampak pada melemahnya pengaruh umat Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik, partisipasi demokratis, serta representasi politik yang efektif. Ketidakharmonisan internal juga mempermudah aktor-aktor luar untuk mengeksploitasi perbedaan umat demi kepentingan politik tertentu. (Sahdin Hasibuan dkk, 2024, Hal, 208-222)

3. Hilangnya Fokus pada Pembangunan Umat

Konflik internal menyedot perhatian yang semestinya diarahkan pada agenda pembangunan umat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan generasi muda. Perselisihan berkepanjangan tentang isu-isu teologis minor atau perbedaan mazhab membuang energi produktif yang lebih dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan umat. Dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan atau dakwah bahkan terpecah akibat konflik internal, sehingga strategi pemberdayaan umat menjadi tidak terarah dan tidak berkelanjutan.

4. Menurunnya Citra Islam sebagai Agama Kedamaian

Ketika umat Islam terlibat dalam konflik internal yang keras dan sering kali bersifat publik, citra Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menjadi terdistorsi. Masyarakat luas, termasuk generasi muda Muslim sendiri, dapat melihat agama sebagai sumber perpecahan, bukan persatuan. Ketika narasi kekerasan verbal, saling mengkafirkan, atau permusuhan antar kelompok Muslim mewarnai ruang publik, persepsi global terhadap Islam juga terpengaruh. Hal ini berpotensi memperkuat islamofobia dan menurunkan legitimasi moral umat dalam membangun dialog antaragama. (Michael Alexander, 2019, hal 115-138)

5. Hambatan terhadap Integrasi Sosial dan Stabilitas Nasional

Dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia, konflik internal umat Islam tidak hanya berpengaruh pada komunitas Muslim itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas sosial secara lebih luas. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni nasional. Ketika terjadi perpecahan internal, dinamika konflik tersebut dapat merembes ke hubungan antarkelompok agama lain atau memicu ketegangan horizontal berdasarkan etnis, politik, dan budaya. Konflik internal juga dapat dimobilisasi oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek yang justru mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan umat Islam untuk mengelola perbedaan secara bijak.

6. Penguatan Kelompok Ekstrem dan Radikal

Ketika konflik internal tidak terselesaikan, kelompok-kelompok ekstrem sering memanfaatkannya untuk menanamkan ideologi intoleran dengan menawarkan “solusi-hitamhitam” terhadap perbedaan. Mereka memanfaatkan kekecewaan sebagian umat terhadap konflik, lalu mengarahkan mereka pada pemahaman keagamaan yang eksklusif dan radikal.



Hal ini meningkatkan risiko radikalisasi, terutama pada kalangan remaja dan pengguna media sosial yang rentan terhadap simplifikasi teologis. Pada akhirnya, konflik internal yang tidak dikelola dapat menjadi pintu masuk bagi ekstremisme kekerasan.

7. Disrupsi terhadap Lembaga Keagamaan Tradisional

Pesantren, majelis taklim, dan lembaga pendidikan Islam sering kali terdampak konflik internal, terutama ketika perselisihan terjadi antara guru agama, kyai, atau tokoh lokal. Perpecahan dalam lembaga keagamaan dapat menurunkan kualitas pendidikan, memutus mata rantai transmisi keilmuan, dan menghilangkan peran lembaga tersebut sebagai agen moderasi sosial di masyarakat. (Muhammad Sahlan dkk, 2019, hal 271-288).

Secara keseluruhan, konflik internal umat Islam bukan sekadar pertentangan teologis, tetapi merupakan fenomena multidimensi yang memengaruhi struktur sosial umat, dinamika politik nasional, dan citra Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rekonsiliatif yang kuat dan berkelanjutan salah satunya melalui penerapan manhaj Aswaja untuk memastikan bahwa perbedaan dapat dikelola secara produktif demi kemaslahatan umat dan stabilitas bangsa.

Peran Aswaja dalam Membangun Rekonsiliasi Sosial

Prinsip dasar Ahlussunnah wal Jama'ah, yang bersumber kepada alQur'an, sunnah, ijma', dan qiyas ini telah menjadi paradigma sosialkemasyarakatan warga NU yang terus dikembangkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat Islam dan pemikirannya. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi (Saman Hudi, 2016, hal 178-179):

1. Prinsip tawassuth, yaitu jalan tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri. Dalam paham Ahlussunnah wal Jama'ah, baik di bidang hukum (syari'ah) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem. Sikap moderasi Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin pada metode pengambilan hukum (istinbâth) yang tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (al-ra'y). Metode (manhaj) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam mazhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum.
2. Prinsip tawâzun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Ahlussunnah wal Jama'ah ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat. Dalam politik. Ahlussunnah wal Jama'ah tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrim). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Jadi, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas tawâzun.
3. Prinsip tasâmuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami (ukhuwwah islâmiyyah). Berbagai



pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Ahlussunnah wal Jama'ah memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial. Dalam diskursus sosial-budaya, Ahlussunnah wal Jama'ah banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya.

4. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam tradisi kaum Sunni terkesan hadirnya wajah kultur Syi'ah atau bahkan Hinduisme. Sikap toleran Ahlussunnah wal Jama'ah yang demikian telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan secara lebih luas. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip ketuhanan. Keempat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran.

Empat prinsip dasar ini bisa dipahami sebagai modal sosial bagi NU karena Modal sosial (social capital) merupakan konsep yang bermakna multidimensional. Terdapat dua aliran dalam memahami konsep tersebut, yaitu modal sosial sebagai sumberdaya yang digunakan bersama dan modal sosial sebagai beragam cara berinteraksi. Dalam pemahaman pertama, sumberdaya menjadi bersifat sosial karena dapat diperoleh dan digunakan melalui adanya hubungan dengan orang lain. Dalam pemahaman pertama ini modal sosial merupakan atribut individu. Berbeda dengan pemahaman pertama, dalam pemahaman kedua modal sosial dipandang sebagai atribut masyarakat untuk mengkarakterisasi beragam cara yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk saling berinteraksi.

KESIMPULAN

Konflik internal umat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah umat manusia. Namun, dalam konteks masyarakat modern, konflik tersebut hadir dengan bentuk yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh dinamika doktrin, politik identitas, relasi mayoritas minoritas, serta perkembangan teknologi informasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik internal tidak hanya berdampak pada lahirnya polarisasi teologis, tetapi juga memicu disintegrasi sosial, melemahkan posisi umat Islam dalam ruang publik, menghambat pembangunan umat, dan mencoreng citra Islam sebagai agama yang membawa kedamaian. Dampak-dampak tersebut menjadi semakin nyata ketika media sosial mempercepat penyebaran narasi intoleran dan memperbesar potensi radikalisasi.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah hadir sebagai tawaran konseptual dan praksis yang relevan. Prinsip tawassuth mendorong umat berada pada posisi moderat dan tidak terjebak ekstremisme; prinsip tawazun mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat; prinsip tasamuh menekankan toleransi dan



penerimaan terhadap keragaman; dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar menghadirkan keberanian moral untuk memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Empat prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teologis, tetapi juga sebagai modal sosial yang memperkuat interaksi, solidaritas, dan integrasi sosial umat.

Keseluruhan kajian ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai Aswaja merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun rekonsiliasi sosial di tengah meningkatnya polarisasi umat. Implementasi nilai Aswaja perlu diperkuat melalui pendidikan keagamaan, dakwah digital yang inklusif, penguatan lembaga sosial keagamaan, serta kolaborasi antara ulama, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, umat Islam dapat mengelola perbedaan secara dewasa, menghindari konflik yang destruktif, serta berkontribusi lebih besar bagi stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Faiz (2020). Transformasi Konflik Bernuansa Agama Dan Strategi Reformatif Pada Pembangunan Budaya Damai Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. 14 (2), 180-181
- Kamal, A. (2021). Diktat Sosiologi Agama (A. Kamal (ed.); 1st ed.). Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Michael Alexander (2019). Perdamaian Dan Rekonsiliasi: Sebuah Eksplanasi Kekerasan Berbasis Agama Dan Upaya Melampauinya. *Geneva - Jurnal Teologi dan Misi*. Vol. 17, No.2, Desember 2019: 115-138
- Muhammad Sahlan dkk (2019). Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh. *Society*, 7 (2), 271-288
- Ratna Dwi Anjani, Aceng Kosasih. (2024). Peran Komunitas Agama Islam Dalam Membangun Toleransi Dan Menuntaskan Konflik Agama Di Indonesia. *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. IV, No 1:16-29
- Saman Hudi (2016). Aswaja An-Nahdiah Sebagai Modal Sosial Dalam Mengokohkan NKRI. Vol. 1 No.2, 178-179
- Sahdin Hasibuan dkk (2024). Institusi Agama Sebagai Penggerak Perdamaian: Studi Kasus Konflik Sosial di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research* Volume 01, Nomor 02, Tahun 2024, 208-222
- Wahid Foundation. 2018. Membatasi Para Pelanggar; Laporan Tahunan Kemerdekaan Agama Berkeyakinan Wahid Foundation 2018. Wahid Foundation.